

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Laut China Selatan (LCS) adalah salah satu jalur perairan paling penting secara strategis di dunia karena posisinya sebagai jalur perairan global utama yang dikelilingi oleh beberapa jalur perairan internasional dan memasok sumber daya alam seperti gas, minyak, dan keanekaragaman hayati laut yang kaya. Arus kapal kadang menunjukkan bahwa pentingnya LCS tidak terbatas pada negara-negara yang memiliki klaim, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Tiongkok yang mengklaim wilayah melalui “*nine-dash line*”, tetapi wilayah ini juga dianggap penting bagi negara-negara di dunia karena memiliki wilayah yang strategis dari sisi maritim (Ulum, et al., 2025).

Klaim tumpang tindih tersebut secara hukum telah diuji melalui mekanisme arbitrase internasional yang diajukan Filipina pada tahun 2013. Berdasarkan putusan tanggal 12 Juli 2016 tersebut *Permanent Court of Arbitration* menyatakan bahwa klaim “hak historis” sebagaimana ditegakkan dalam kasus *nine-dash line* tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS dan tidak dapat mengesampingkan hak hukum Filipina dalam kasus Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka (PERMANENT COURT OF ARBITRATION, 2016). Wilayah yang dianggap sebagai klaim tumpang tindih meliputi Second Thomas Shoal (Ayungin Shoal), Scarborough Shoal, dan beberapa fitur kepulauan Spratly yang terletak di wilayah Manila disebut sebagai *West Philippine Sea*.

Peralihan transisi Presiden Filipina dari Duterte ke Marcos jr. pada tahun 2022 merupakan titik balik penting dalam perkembangan kebijakan luar negeri terhadap Tiongkok dalam konteks LCS. Di bawah Duterte, kebijakan luar negeri di Filipina

sering dipandang sebagai pragmatis dengan pendekatan kooperatif terhadap Tiongkok yang memperkuat investasi bilateral dan hubungan ekonomi, meskipun tantangan terhadap kedaulatan tetap ada (Fathun, Chairunnisa, Nidatya, Sutiono, & Santa, 2025). Filipina telah mempertahankan sikap yang lebih moderat dan diplomatis dalam hubungannya dengan Tiongkok, dengan penekanan pada stabilitas regional dan ekonomi.

Namun, setelah Ferdinand Marcos Jr. terpilih sebagai Presiden pada tahun 2022, terjadi perubahan signifikan dalam arah kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok. Menurut laporan *Asia Maritime Transparency Initiative* (AMTI) dari *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), sejak 2022 terjadi peningkatan jumlah konfrontasi internal antara komunitas Tiongkok dan Filipina di dekat Second Thomas Shoal dan Scarborough Shoal (Asia Maritime Transparency Initiative, 2024).

Kemudian, pada tahun 2023 beberapa kapal penjaga Pantai Cina menembakkan *water cannon* dan melakukan manuver memblokir sekitar hampir 20 kapal nelayan Filipina di dekat Scarborough Shoal, Sabina Shoal, wilayah yang di klaim sebagai bagian dari ZEE Filipina (AARON-MATTHEW LARIOS, 2025). Laporan tersebut mendokumentasikan penggunaan meriam air, manuver berbahaya, blockade misi suplai, hingga gesekan fisik kapal sebagai bagian dari taktik *gray zone coercion* Tiongkok. International Crisis Group (2024) dalam laporannya "*The Philippines: Tensions in the South China Sea*" mencatat bahwa sejak pertengahan 2022 sampai 2024 terjadi lebih dari dua puluh insiden serius yang

melibatkan intersepsi dan tindakan koersif terhadap kapal Filipina (China-Philippines Tensions in the South China Sea, 2025).

Sementara itu, *Council on Foreign Relations* (CFR) melalui *Global Conflict Tracker* juga mengklasifikasikan konflik ini sebagai eskalasi berkelanjutan sejak awal masa jabatan Marcos jr., terutama di wilayah Second Thomas Shoal yang menjadi titik gesekan utama antara kedua negara (Center for Preventive Action, 2024). Perpindahan ini mencerminkan transformasi orientasi strategis yang lebih menekankan pada *balancing strategy* di tingkat internasional. Menghadapi tekanan ini, pemerintahan Marcos Jr. memperkenalkan serangkaian kebijakan strategis, menandai pergeseran arah kebijakan luar negeri Filipina dibandingkan masa lalu.

Pertama, Ferdinand Marcos Jr. menegaskan kembali penegakan putusan arbitrase tahun 2016, menjadikannya landasan diplomasi internasional Filipina (Presidential Communications Office , 2024). Kedua, pemerintahannya memperluas kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, menambahkan empat lokasi baru: Naval Base Camilo Osias, Lal-lo Airport, Camp Melchor Dela Cruz, dan Balabac Island. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat modernisasi militer Filipina serta meningkatkan hubungan dan memperkuat kesiapan menghadapi ancaman maritim di kawasan Indo-Pasifik, sesuai dengan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCD) pada 2023 (U.S. Department of Defense., 2023). Ketiga, Filipina meningkatkan patroli bersama dengan Amerika Serikat dan mitra regional lainnya di Laut Cina Selatan sepanjang 2023-2024. Ketiga, antara tahun 2023 dan 2024, Filipina memperkuat patrol bersama di LCS dengan AS dan mitra regional lainnya. Partisipasi mitra regional lainnya seperti Australia dan Jepang

mencerminkan pendekatan multilateral Filipina terhadap isu-isu keamanan regional. Lebih lanjut, Marcos Jr. terus menyampaikan protes diplomatik kepada Tiongkok melalui nota diplomatik resmi, meningkat dibandingkan periode sebelumnya (Presidential Communications Office , 2024). Kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan akomodatif menuju *strategi balancing* yang lebih tegas terhadap Tiongkok.

Selain itu, studi akademis lainnya menunjukkan bahwa setelah putusan arbitrase internasional, dukungan AS untuk Filipina dalam konflik LCS mencakup bantuan militer, dukungan diplomatik, dan advokasi untuk prinsip-prinsip kebebasan navigasi dan hukum maritim internasional. Dukungan ini telah menjadi faktor penting yang memengaruhi strategi keamanan Manila, karena mengurangi kerentanan Filipina terhadap tekanan China dan membangun kerangka keamanan yang lebih kuat yang dapat dimanfaatkan dengan baik lebih oleh para pembuat kebijakan Filipina ketika mempertimbangkan berbagai faktor eksternal (Zebua & Shiddiqy, 2025).

No	Bentuk Perubahan Kebijakan	Kondisi Era Sebelumnya (Duterte)	Era Marcos Jr. (2022-2024)	Indikasi Program Change
1	Pendekatan terhadap Tiongkok	Cenderung akomodatif, mengutamakan engagement ekonomi	Lebih tegas dan terbuka mengkritik tindakan Tiongkok di Laut China Selatan	Perubahan gaya diplomasi dan retorika
2	Implementasi EDCA dengan AS	Relatif lambat, bahkan sempat ingin membatasi kerja sama	Menambah 4 lokasi baru EDCA pada 2023 (total 9 lokasi)	Penguatan aliansi keamanan
3	Posisi terhadap hukum internasional	Putusan arbitrase 2016 jarang ditekankan	Putusan arbitrase kembali dijadikan dasar diplomasi	Revitalisasi legal diplomacy
4	Pendekatan ASEAN	Mengandalkan mekanisme regional	Tetap lewat ASEAN namun menilai perlu dukungan eksternal tambahan	Hedging regional
5	Sikap Presiden	Cenderung pragmatis terhadap Beijing	Menyatakan Filipina “tidak akan menyerah” atas klaim maritim	Nasionalisme kedaulatan

Tabel 1 1 Sumber: Diolah penulis dari (Fan, 2024), (Reuters, 2024), (ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2024), (Reuters, 2024)

Perubahan-perubahan tersebut terlihat jelas sepanjang periode 2023-2024, ketika eskalasi insiden maritim di kawasan sengketa semakin meningkat dan mendorong Filipina menyesuaikan strategi luar negerinya demi menjaga kedaulatan nasional serta kepentingan keamanan negara. Untuk melihat bentuk konkret dari perubahan kebijakan ini, tabel berikut menunjukkan perkembangan/perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok pada periode 2023-2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok berubah dalam sengketa Laut Cina Selatan selama

pemerintahan Ferdinand Marcos Jr. (2022-2024) menggunakan pendekatan analisis kebijakan luar negeri. Penelitian ini mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu yang telah mengkaji kebijakan luar negeri Filipina, dinamika sengketa Laut China Selatan, serta respons negara-negara kawasan terhadap meningkatnya pengaruh dan aktivitas Tiongkok di wilayah tersebut. Beberapa di antaranya adalah:

Pertama, judul artikel mengenai “*Tragedy of Small Power Politics: Duterte and the Shifting Sands of Philippine Foreign Policy*” yang disusun oleh Richard Javad Heydarian (2017). Artikel tersebut membahas tentang menyurutnya pola fluktuatif kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok yang cenderung berubah mengikuti pergantian rezim. Pola tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam orientasi kebijakan jangka panjang. Setiap presiden tampaknya berusaha membedakan diri dari pendahulunya sebagai bagian dari strategi legitimasi politik domestik (Heydarian, 2017).

Kedua, yang berjudul “*Narratives of the South China Sea Under the Marcos Administration in the Philippines: Characteristics, Trends, and Impacts*” yang disusun oleh Kaicheng Lin, Jingrong Liu, Ming Tsun Chau, Hailong Ju (2024). Jurnal yang kedua ini menunjukkan bahwa adanya perubahan diskursus strategis dalam kebijakan luar negeri Filipina. Pemerintahan Marcos Jr. lebih menekankan aspek kedaulatan, supremasi hukum internasional, demokrasi, dan kerja sama keamanan dengan negara-negara barat (Lin, Liu, Chau, & Ju, 2024).

Ketiga, artikel terakhir yang berjudul “*From Aquino to Marcos: political survival and Philippine foreign policy towards China*” yang disusun oleh Alvin Camba (2023). Untuk jurnal ketiga ini menitikberatkan pada peran faktor domestik

dalam pembentukan kebijakan luar negeri Filipina, termasuk pengaruh presiden, birokrasi pertahanan, opini publik, serta institusi keamanan (Camba, 2023).

Dari sintesis literatur yang ada, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya telah berhasil menjelaskan faktor penyebab perubahan kebijakan dan perubahan narasi diplomatik, tetapi belum menguji secara sistematis tingkat perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam tipologi yang jelas. Tidak ada penelitian yang secara khusus menggunakan model Eidenfalk untuk menganalisis periode 2023-2024 sebagai fase awal konsolidasi kebijakan luar negeri Marcos Jr.

Dengan demikian, terdapat beberapa *research gap* yang signifikan. Pertama, terdapat gap teoretis karena belum ada penelitian yang menggunakan model perubahan kebijakan luar negeri Eidenfalk dalam konteks Filipina-Tiongkok. Kedua, terdapat gap konseptual karena literatur sebelumnya belum membedakan secara eksplisit antara perubahan taktis, programatik, dan orientasional. Ketiga, terdapat gap empiris karena periode awal pemerintahan Marcos Jr. belum dianalisis secara komprehensif sebagai fase transisi kebijakan luar negeri yang potensial bersifat transformasional.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkategorikan perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok pada era Marcos Jr menggunakan tipologi perubahan kebijakan Eidenfalk. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perubahan itu terjadi, tetapi juga seberapa dalam perubahan tersebut berlangsung, serta pengayaan literatur mengenai dinamika kebijakan luar negeri di Asia Tenggara dalam konteks rivalitas kekuatan besar di Laut Cina Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah mengapa terjadi perubahan kebijakan Luar Negeri Filipina terhadap Tiongkok dalam sengketa Laut Cina Selatan pada era pemerintahan Duterte hingga Marcos jr. (2023-2024)?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini dilakukan untuk memperluas pengetahuan pembaca melalui makalah ilmiah. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Kebudayaan, dan Ilmu Politik, Universitas Veteran Pembangunan Nasional, Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan melalui latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan secara khusus untuk mengidentifikasi bentuk dan arah perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok dalam sengketa Laut Cina Selatan pada periode 2023-2024, serta menganalisis pengaruh lingkungan internasional, khususnya dinamika kawasan dan rivalitas Amerika Serikat dengan Tiongkok terhadap perubahan kebijakan luar negeri Filipina.

1.4 Kerangka Teori

Dalam menjelaskan penelitian ini, penulis memakai Teori *Foreign Policy Change* adalah teori yang menyajikan penjelasan sistematis mengenai proses berubahnya kebijakan luar negeri dari sebuah negara dalam menghadapi suatu isu internasional (Eidenfalk, 2006). Untuk membangun model yang dapat menjelaskan proses ini secara menyeluruh, Eidenfalk mengintegrasikan beberapa teori kebijakan luar negeri yang relevan. Hasilnya adalah sebuah model baru yang mencakup

bagian-bagian yang sebelumnya tidak dielaborasi, menjadikannya lebih komprehensif dari pendekatan terdahulu.

Di antara bagian-bagian baru tersebut, terdapat konsep "sumber perubahan" (*sources of change*). Konsep ini mengkategorikan pendorong perubahan ke dalam dua domain: pengaruh domestik, yang mencakup variabel media dan opini publik, serta pengaruh internasional, yang terdiri dari faktor global dan regional. "Sumber perubahan" ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan ketika merevisi kebijakan luar negeri mereka.

1.4.1 Analisis Faktor Domestik

Faktor-faktor domestik termasuk variabel krusial yang secara signifikan mempengaruhi dan memberikan tekanan bagi pemerintah untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, para pemimpin harus memperhitungkan dinamika domestik dalam setiap perumusan kebijakan, sebab legitimasi dan keberlangsungan kekuasaan mereka sangat bergantung pada dukungan yang berasal dari publik dalam negerinya (Eidenfalk, 2006). Adapun menjadi penting untuk kemudian tidak mengabaikan faktor-faktor domestik yang mana hal tersebut menjadi penentu bagi pengambil kebijakan-dalam hal pemberian dan penggulingan kuasa. Adapun kemudian terdapat 5 komponen utama yang memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri di tataran politik domestik, yakni, birokrasi, media, kelompok kepentingan, opini publik dan partai politik.

1.4.2 Birokrasi

Secara tradisional, birokrasi lebih sering dipersepsikan seperti elemen penjaga keseimbangan daripada sebagai pendorong perubahan. Kecenderungan ini disebabkan oleh sifat birokrasi yang operasionalnya terikat pada prosedur standar

dalam sistem pemerintahan, yang pada gilirannya justru dapat menjadi penghambat saat suatu negara hendak melakukan perubahan kebijakan. Hambatan ini muncul karena adanya preferensi di kalangan birokrat untuk mempertahankan *status quo*, sementara hanya sebagian kecil yang aktif mengadvokasi perubahan. Menurut Halperin dalam (Eidenfalk, 2006), upaya untuk mendorong perubahan dari dalam pun tidaklah mudah, sebab birokrat yang pro-perubahan harus melakukan kalkulasi yang cermat atas agenda yang mereka perjuangkan karena adanya batasan-batasan institusional.

1.4.3 Opini Publik

Opini publik dapat dimaknai sebagai respons, pemahaman, atau kepercayaan umum masyarakat luas terhadap suatu isu kebijakan. Opini publik memegang peranan penting, sebab pemerintah memerlukan dukungan rakyat untuk menjalankan kebijakannya dan untuk memastikan mereka tetap memiliki legitimasi saat pemilihan umum tiba. Akan tetapi, jika masyarakat merasa tidak puas, hal tersebut dapat memicu gelombang protes yang kuat. Tekanan dari publik ini pada akhirnya bisa mendorong pemerintah untuk merevisi atau mengubah total kebijakan luar negerinya (Eidenfalk, 2006).

1.4.4 Media

Peran media dalam dinamika perubahan kebijakan bersifat krusial karena fungsinya sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhitungkan media untuk memobilisasi dukungan publik atas kebijakan yang telah dirumuskan. Menurut Eidenfalk (2006), signifikansi media dalam mendorong perubahan kebijakan luar negeri dapat diidentifikasi melalui tiga fungsi utamanya. Pertama, media bertindak sebagai

pembentuk opini publik dengan cara menyebarkan informasi mengenai kebijakan pemerintah. Kedua, media berperan sebagai penyelidik (*investigator*) yang menyajikan temuan informatif kepada pemerintah dan publik, yang dapat memicu perubahan kebijakan. Ketiga, media berfungsi sebagai forum bagi aktor negara ataupun non-negara untuk memberikan tekanan atau sebaliknya, menaikkan legitimasi suatu kebijakan. Dengan demikian, pengaruh media dapat bersifat ganda: membangun dukungan publik atau justru menciptakan tekanan tambahan yang berpotensi menjatuhkan pemerintah.

1.4.5 Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan dapat dimaknai sebagai sebuah perkumpulan terorganisir yang memiliki tujuan spesifik dan secara aktif terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan. Pengaruh entitas ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Karakteristik utama mereka adalah fokus pada isu-isu tunggal (*single-issues*) yang berhasil menarik perhatian publik. Kemudian fenomena ini menuntut pemerintah untuk memberikan respons yang lebih serius terhadap masalah ini, karena jika diabaikan, pemerintah berisiko kehilangan posisi atau kepentingannya sebagai otoritas pembuat kebijakan.

1.4.6 Partai Politik

Dalam konteks ini, partai politik merujuk pada mereka yang terwakili di parlemen. Pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari partai-partai ini ketika membuat atau mengubah kebijakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah (atau birokrat) memiliki keterbatasan, dan salah satu yang terpenting adalah kebutuhan akan dukungan parlemen. Pemerintah secara konsisten

mengandalkan dukungan partai politik sebagai pertimbangan utama ketika merancang dan memberlakukan kebijakan.

1.4.7 Faktor Pengaruh Internasional

Lanskap politik internasional adalah sistem kompleks yang melibatkan interaksi antara negara, lembaga internasional, dan entitas non-negara di berbagai tingkatan. Untuk menganalisis pengaruh faktor internasional terhadap pembentukan kebijakan luar negeri, penting tidak hanya untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat tetapi juga untuk memeriksa elemen-elemen seperti distribusi kekuasaan, norma, dan peran lembaga. Identifikasi pengaruh internasional ini dapat diuraikan lebih lanjut menjadi empat komponen utama: global, regional, hubungan bilateral, dan peran aktor non-negara.

1.4.8 Global

Faktor global merujuk pada perubahan skala besar dalam sistem politik internasional yang secara signifikan memengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara. Suatu peristiwa atau tindakan tunggal oleh aktor utama dapat memicu perubahan mendasar dengan mengubah tatanan politik internasional, fungsi lembaga global, dan bahkan norma-norma yang telah mapan. Misalnya, peristiwa 9/11 tidak hanya mendorong Amerika Serikat untuk meluncurkan "Perang Melawan Teror" tetapi juga secara drastis memengaruhi sistem politik dan keamanan berbagai negara hingga saat ini. Oleh karena itu, faktor global merupakan komponen penting dalam mengidentifikasi pengaruh internasional.

1.4.9 Regional

Dampak dari suatu peristiwa internasional sering kali tidak hanya dirasakan di tingkat global, tetapi juga bergema kuat di tingkat regional. Institusi regional dan dinamika antar negara tetangga memiliki pengaruh penting dalam perumusan

kebijakan luar negeri. Setiap kawasan memiliki tatanan unik yang dibentuk oleh kombinasi budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang berbeda antar negara. Konteks regional ini menciptakan serangkaian aturan dan norma tak tertulis yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan saat merumuskan langkah-langkah strategis mereka. Dengan demikian, faktor regional adalah elemen yang tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan bagian integral dari analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri.

1.4.10 Hubungan Bilateral

Faktor ini berfokus pada bagaimana hubungan langsung antara dua aktor atau lebih dapat mempengaruhi keputusan kebijakan. Hubungan yang dimaksud tidak terbatas pada relasi antarnegara, tetapi juga mencakup interaksi negara dengan aktor lain seperti institusi internasional. Dalam dinamika ini, seorang aktor dapat memanfaatkan daya ungkit (*leverage*) yang dimilikinya seperti aliansi militer, ketergantungan ekonomi, atau ancaman sanksi untuk menekan pihak lain agar mengadopsi atau menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka sesuai dengan kepentingannya.

1.4.11 Aktor Non-Negara

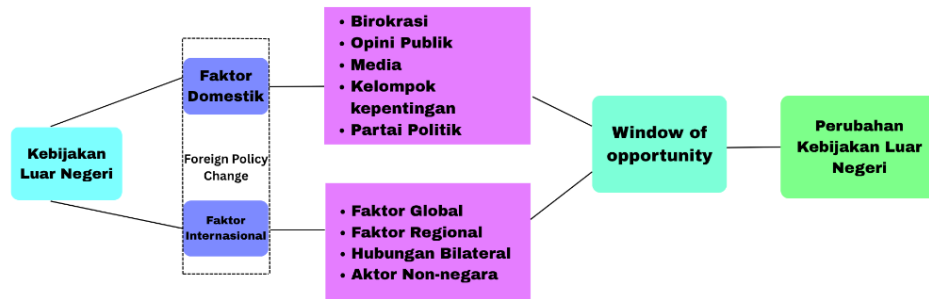
Aktor non-negara adalah orang atau kelompok yang punya pengaruh besar terhadap keputusan sebuah negara, tapi mereka sendiri bukan bagian dari negara tersebut. Menurut (Pearlman & Cunningham, 2011), ada lima jenis utama aktor non-negara, antara lain yakni; Aktor Sub-Negara, yaitu kelompok yang berasal dari suatu negara yang mempunyai suatu pengaruh internasional, contohnya ialah korporasi multinasional. Kemudian terdapat Organisasi Antar-Pemerintah (IGO), yaitu kelompok yang tergabung dan didirikan melalui perjanjian.

Kemudian terdapat Aktor Transnasional: Individu atau kelompok yang bergerak lintas negara dan tidak terikat pada satu negara saja, contohnya LSM internasional atau para pencari suaka. Kemudian terdapat Kelompok Politik Bersenjata: Kelompok yang memakai kekerasan untuk tujuan politik, seperti kelompok teroris. Yang terakhir ialah Kelompok Kriminal: Kelompok yang melakukan kejahatan lintas negara untuk mencari keuntungan, seperti mafia atau kartel. Karena pengaruh mereka bisa mengganggu kondisi suatu negara, maka para pembuat kebijakan harus selalu mempertimbangkan keberadaan aktor-aktor non-negara ini.

1.4.12 Windows of Opportunity

Proses perubahan kebijakan luar negeri tidak berlangsung secara mekanis semata-mata sebagai respons terhadap *sources of changes*. Terdapat faktor dari para *key decision-makers* dan persepsi mereka terhadap suatu isu, memegang peranan yang sama pentingnya. Dalam konteks ini, *Windows of Opportunity* merujuk pada sebuah momentum strategis yang dimanfaatkan oleh aktor untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Momentum ini dapat terbuka ketika para aktor mengidentifikasi sebuah *policy windows*, merasakan adanya tekanan signifikan dari *sources of change*, atau ketika mereka secara sadar, melalui persepsi pribadi, melihat adanya kesempatan untuk mendorong terjadinya perubahan melalui agenda politik tertentu.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran

Sumber: (Eidenfalk, 2006)

Penulis telah mengembangkan kerangka sintesis konseptual berdasarkan studi kasus menggunakan landasan teoritis yang diuraikan di atas. Berdasarkan diagram di atas, penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah melalui faktor dan momentum. Penulis menyajikan faktor domestik dan internasional yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Faktor domestik ini meliputi birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, dan partai politik. Faktor internasional meliputi aktor global, regional, bilateral, dan non-negara. Faktor-faktor ini kemudian dimanfaatkan oleh para pembuat keputusan untuk menanggapi peluang atau momentum kunci yang ada dan berfungsi sebagai dasar untuk mengubah kebijakan luar negeri negara tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan diagram sintesis konseptual di atas untuk menganalisis perubahan

kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok dalam Sengketa Laut Cina Selatan selama era Ferdinand Marcos Jr. (2023-2024).

1.6 Argumen Utama

Menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri dari Joakim Eidenfalk, perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok pada 2023-2024 sebagai hasil interaksi antara faktor domestik dan internasional yang membuka *windows of opportunity* bagi Ferdinand Marcos Jr. untuk melakukan penyesuaian kebijakan.

Dari sisi domestik, perubahan didorong oleh birokrasi keamanan seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Angkatan Bersenjata Filipina yang melihat eskalasi insiden maritim sebagai ancaman kedaulatan. Dukungan koalisi pemerintahan berbagai partai dalam UniTeam Alliance, tekanan kelompok nelayan seperti Pamalaya, pemberitaan media nasional seperti, Philippine Daily Inquirer yang dapat memberikan sentimen nasionalisme publik turut memperkuat legitimasi pemerintah untuk bersikap lebih tegas terhadap Tiongkok.

Dari sisi internasional, perubahan dipengaruhi oleh meningkatnya tindakan koersif Tiongkok dalam hubungan bilateral, khususnya insiden di Second Thomas Shoal yang memperburuk kepercayaan kedua negara. Pada tingkat regional, keterbatasan ASEAN dalam merespons sengketa Laut Cina Selatan mendorong Filipina mencari kerja sama keamanan tambahan. Pada tingkat global, dukungan Amerika Serikat melalui penguatan kerja sama pertahanan dan implementasi EDCA juga memberikan jaminan keamanan bagi Filipina.

Interaksi antara faktor internasional dan domestik, serta terjadinya momentum baru, dimana pemerintahan Filipina memperbarui kerja samanya pada tahun 2023 dengan Amerika Serikat melalui program EDCD yang menciptakan sebuah *windows of opportunity* yang dimanfaatkan Marcos Jr. untuk melakukan *program change* berupa penguatan kerja sama pertahanan, peningkatan patroli bersama, dan sikap diplomatik yang lebih tegas terhadap Tiongkok tanpa mengubah orientasi geopolitik Filipina secara mendasar.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif adalah penelitian yang harus mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer, atau berbagai sistem terbatas (berbagai kasus), melalui sejumlah pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi atau banyak sumber informasi (buku, artikel, dokumen resmi, dan laporan) yang dikumpulkan sesuai dengan topik penelitian (Creswell, J. W., 2014). Metode penyajian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif eksploratif yang menjelaskan dan menganalisis penyebab suatu masalah menggunakan konsep yang relevan. Penelitian eksploratif diarahkan pada studi kasus yang hubungan kausalnya (sebab dan akibat) dianalisis, sebagai asumsi untuk prediksi lebih lanjut dari korelasi yang terbukti antara variabel dependen dan independen yang terlibat (Nugrahani, F., & Hum, M., 2014).

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dibatasi pada periode 2023-2024, yaitu sejak awal masa pemerintahan Ferdinand Marcos Jr. Pembatasan temporal ini didasarkan pada asumsi dalam studi kebijakan luar negeri bahwa fase awal pemerintahan merupakan

periode krusial dalam pembentukan arah kebijakan karena presiden memiliki legitimasi elektoral dan ruang manuver politik yang relatif lebih besar (Hermann, Charles F, 1990). Secara substantif, penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan luar negeri Filipina yang berkaitan langsung dengan sengketa Laut Cina Selatan, termasuk penguatan aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat, implementasi dan perluasan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA), peningkatan protes diplomatik terhadap Tiongkok, serta penggunaan kembali putusan arbitrase 2016 sebagai dasar legitimasi internasional. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga fokus analisis dan menghindari perluasan variabel yang tidak relevan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi data sekunder. Data yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen yang dapat diakses secara publik melalui internet. Guna menjamin objektivitas dan meminimalisasi bias dalam proses seleksi, proses pencarian data dilakukan dengan memanfaatkan mesin pencari non-pelacakan (Cheong, Lyons, & Majumdar, 2023). Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini difokuskan pada sumber-sumber berupa dokumen-dokumen berbahasa Inggris yang berfungsi sebagai penunjang. Sumber-sumber tersebut terdiri atas literatur akademik, dokumen dari situs web resmi pemerintah, serta materi dari media berita terkemuka, termasuk portal berita Internasional Philipina seperti Philippine Daily Inquirer. Seluruh dokumen yang terkumpul dari sumber-sumber tersebut kemudian diseleksi lebih lanjut dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan materi dan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data kualitatif yang berfokus pada deskripsi objek penelitian secara mendalam. Dari berbagai jenis analisis kualitatif, teknik yang secara spesifik digunakan adalah analisis naratif. Pendekatan naratif ini dipilih karena kemampuannya untuk mengolah dan menyajikan kembali keseluruhan data yang terhimpun menjadi sebuah narasi yang koheren dan komprehensif, sesuai dengan tujuan penelitian (Deepublish Store, 2023). Lebih lanjut, penggunaan teknik naratif ini juga bertujuan guna memfasilitasi pemahaman yang komprehensif mengenai hasil penelitian terkait fenomena perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok dalam Sengketa Laut Cina Selatan pada Era Ferdinand Marcos Jr pada tahun 2023-2024.

1.8 Sistematika Penulisan

Sebagai penelitian ini, untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap penelitian ini, diperlukan pendekatan sistematis dalam penulisan. Pendekatan sistematis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, sintesis ide, argumen utama, metodologi penelitian, dan gaya penulisan. Bab ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan metodologis, menjelaskan urgensi penelitian dan pendekatan analitis yang digunakan.

BAB II membahas faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Filipina pada periode 2023-2024. Bab ini berfokus pada faktor domestik seperti birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, dan partai politik.

BAB III membahas faktor internasional seperti faktor global, faktor regional, hubungan bilateral, aktor non-negara, dan peluang sebagai mekanisme perubahan kebijakan pada tahun 2023-2024.

BAB IV berisi kesimpulan yang merangkum temuan penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, dan memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut.